

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PEREMPUAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN NILAI BUDAYA TERHADAP PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK (Studi Kasus Pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019)

Sita Saidah Insyira, Aan Julia, Ade Yunita Mafruhah

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

sitainsyira45@gmail.com

Abstract— Implementation of the 30 percent quota still does not make women's representation in parliament reach the target, even though political parties have followed quota rules. It happens because there are still many obstacles to women's political participation in Indonesia. This study aims to estimate the factors that influence women's participation in politics in 34 provinces in Indonesia during the 2016-2019 time period. The data used in this research is secondary data. The independent variables include the level of women's education is proxied by the average length of schooling of women, human development index (HDI), and cultural values (dummy). The dependent variable is women's participation in politics, which is reflected in the data on the proportion of women in parliament. The method used in this research is descriptive analysis and panel data regression analysis. The results showed that the variable level of women's education would increase women's representation in politics, and the quality of voters proxied from the HDI with cultural values decreased women's representative in politics.

Keywords— *Women's Political Participation, Women's Education Level, Human Development Index, Cultural Values*

Abstrak—Penerapan kuota 30 persen tetap tidak membuat representasi perempuan di parlemen mencapai target representasi, padahal partai politik telah mengikuti aturan kuota. Hal ini terjadi karena masih banyak hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi faktor faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam politik pada 34 Provinsi di Indonesia selama periode waktu 2016-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Variabel independennya meliputi, tingkat pendidikan perempuan yang diproksi oleh rata-rata lama sekolah perempuan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan nilai budaya (*dummy*). Variabel dependennya adalah partisipasi perempuan dalam politik yang direfleksikan oleh data proporsi perempuan dalam parlemen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi data panel. Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel tingkat pendidikan perempuan akan meningkatkan keterwakilan perempuan di politik, sedangkan kualitas pemilih yang diproksi dari IPM serta nilai budaya justru menurunkan keterwakilan perempuan di politik.

Kata Kunci— *Partisipasi Politik Perempuan, Tingkat Pendidikan Perempuan, Indeks Pembangunan Manusia, Nilai Budaya*

I. PENDAHULUAN

Salah satu agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni tujuan kelima berbicara terkait menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk mencapai kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan yang optimal. Ada sembilan target dalam tujuan kelima, salah satunya adalah memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi aktif dan mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik (sdgs.bappenas.go.id, 2016).

Dalam bukunya Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan *United Nation Development Programme* (UNDP) Tahun 2010, tidak ada satu wilayah pun di negara berkembang dimana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Ketimpangan gender antara lain terjadi di pendidikan, pekerjaan, akses atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik. Pencapaian upaya dan program peningkatan kesetaraan serta pemberdayaan gender dievaluasi dengan berbagai ukuran seperti, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Demi mencapai nilai IDG yang lebih baik pemerintah berupaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, salah satunya adalah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Tujuan utama *affirmative action* adalah untuk membuka peluang kepada perempuan agar bisa terintegrasi dalam kehidupan secara adil.

Melihat hasil pemilu tahun 2019 perjuangan kuota 30 persen setidaknya telah membuahkan hasil dari segi kuantitas, meskipun jaminan peningkatan kualitas perempuan dalam dunia politik belum menjanjikan. Namun jika melihat hasil representatif, dengan adanya kebijakan ini belum mampu untuk mendongkrak keterwakilan perempuan minimal 30 persen di parlemen. Berdasarkan Tabel 1 Pemilu 2019 jumlah perempuan dalam parlemen (DPR) di tingkat nasional sebesar 20,5 persen (yakni 118 orang dari total 575 anggota DPR RI). Meskipun angka ini telah menunjukkan peningkatan dari Pemilu 2014 sebesar 17,32 persen. Anggota legislatif perempuan juga mengalami peningkatan di tingkat provinsi.

TABEL 1. PERBANDINGAN REPRESENTASI ANGGOTA DEWAN DI DPR RI

PERIODE	PEREMPUAN	LAKI-LAKI
1999-2004	46 (9%)	454 (91%)
2004-2009	65 (11,6%)	435 (87%)
2009-2014	101 (18%)	459 (82%)
2014-2019	97 (17,3%)	463 (82,7%)
2019-2024	118 (20,5%)	457 (79,5%)

Sumber : Dikutip dari berbagai sumber

Jika dilihat perbandingannya antara capaian pendidikan perempuan dan pembangunan sumber daya manusia dengan proporsi perempuan di parlemen ada ketidaksesuaian. Hal ini tergambar dari Tabel 2 yang menunjukkan provinsi-provinsi yang memiliki capaian tertinggi pada proporsi perempuan dalam politik (APP), tingkat pendidikan perempuan (RLS), dan indeks pembangunan manusia (IPM).

TABEL 2. PROVINSI DENGAN CAPAIAN TERTINGGI APP, RLS, DAN IPM TAHUN 2019

Proporsi Perempuan di DPRD (APP)	Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (RLS)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kalimantan Tengah (35,50 %)	DKI Jakarta (10,96 tahun)	DKI Jakarta (80,76)
Sulawesi Utara (28,80%)	Kepulauan Riau (9,77 tahun)	DI Yogyakarta (79,99)
Sulawesi Selatan (27,00%)	Maluku (9,66 tahun)	Kalimantan Timur (76,61)
Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (26,60%)	Sulawesi Utara (9,39 tahun)	Kep.Riau (75,48)
	Kalimantan Timur (9,25 tahun)	Bali (75,38)

Sumber : Puskapol FISIP UI dan BPS

Berdasarkan tabel 2 DKI Jakarta dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan sebesar 10,96 yang artinya perempuan mampu menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas dan IPM tertinggi sebesar 80,76 persen. Tetapi tingkat pendidikan perempuan dan IPM tersebut tidak selaras dengan proporsi perempuan dalam politiknya yang mana DKI Jakarta hanya mampu mencapai 21,7 persen, angka tersebut masih jauh dari target 30 persen keterwakilan perempuan.

Ketidaksesuaian antara pendidikan perempuan dengan partisipasi politik perempuan masih terjadi, hal ini dikarenakan adanya tantangan yang harus dihadapi perempuan dalam memasuki dunia politik adalah masih belum adanya kesesuaian produk hukum dengan praktik lapangan. Bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan diciptakan secara sistematis dalam jangka waktu panjang, ini adalah budaya patriarki dan nilai-nilai sosial di Indonesia menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan, dan politik dianggap sebuah ranah yang prerogatif milik laki-laki (Andriana, 2012).

Mobilitas perempuan dan akses ke ruang politik dan

publik formal dibatasi oleh purdah dan gagasan tentang ruang publik yang dipisahkan berdasarkan gender. Kurangnya pengetahuan tentang fungsi dan aturan pemerintah menggagalkan kemampuan perempuan setelah terpilih untuk menjabat (Tadros, 2014).

Hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian bagaimana pengaruh tingkat pendidikan perempuan, indeks pembangunan manusia dan nilai budaya dapat memengaruhi partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia dengan menggunakan data 34 Provinsi.

II. LANDASAN TEORI

A. Teori Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok-kelompok sosial dalam sistem tersebut. Karena pembangunan merupakan upaya berkelanjutan untuk mengangkat masyarakat dalam sistem sosial secara keseluruhan ke kehidupan yang lebih baik dan lebih manusiawi (Todaro & Smith, 2011).

B. Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti "mengambil bagian". Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004).

Politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu (Budiarjo, 2008).

Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, mencakup sampai sejauh mana pengetahuan dan minat seseorang serta perhatiannya terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia berada. Kesadaran politik tidak bisa dilepaskan dari internalisasi nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat individu tersebut. Kepercayaan terhadap pemerintah lebih terkait pada penilaian individu terhadap pemerintahan yang

ada. Apakah pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.

C. Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut, serta mewariskannya kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan.

D. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dasar yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Menurut *United Nation Development Programme*, Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

E. Nilai Budaya

Nilai budaya menurut Koenjaraningrat adalah nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang memengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan yang tersedia (Bagit, 2017).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode data panel dan model *Common Effect Model* serta diuji asumsi klasik yang meliputi uji t-statistik, multikolinieritas dan uji heteroskedastis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan perempuan, indeks pembangunan manusia, dan nilai budaya terhadap partisipasi perempuan dalam politik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan runtut waktu (*time series*) dalam bentuk data tahunan dari tahun 2016-2019. Data yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan perempuan ialah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Nilai Budaya dengan *dummy variable*, serta partisipasi perempuan dalam politik dengan data proporsi perempuan di parlemen. Hasil penelitian ini disajikan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Hasil Estimasi Model, Olah Data

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.73566	10.86212	2.461366	0.0151
RLS	3.459571	0.838433	4.126235	0.0001
IPM	-0.477721	0.209750	-2.277577	0.0244
D1	-6.654965	2.822627	-2.357720	0.0199
D2	-3.834856	1.755033	-2.185062	0.0307

Sumber : Olah data EViews 7.2

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Perempuan terhadap Partisipasi Perempuan dalam Politik
Berdasarkan hasil estimasi pada gambar 1 hasil penelitian diperoleh bahwa variabel tingkat pendidikan perempuan meningkatkan keterwakilan perempuan di politik. Dalam konstelasi politik, kualitas dan kapabilitas perempuan sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat serta dukungan masyarakat. Karena partisipasi perempuan dalam politik dipengaruhi oleh masyarakat yang mendukung dan ditunjang oleh kondisi yang sudah mapan secara ekonomi, profesi, dan strata sosialnya. Selain itu juga pendidikan akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir *holistic* dan responsif gender. Seperti yang dinyatakan dalam kerangka pemikiran bahwa pendidikan dapat memperbaiki kemampuan ekonomi dan produktivitas. Hal ini akan memengaruhi kinerja perempuan dalam politik, dan berujung pada bagaimana kinerja tersebut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan perempuan dalam politik.
2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia
Hasil estimasi model menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam politik. Indeks pembangunan manusia menjelaskan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Semakin tinggi IPM mengindikasikan semakin baik pembangunan manusianya yang artinya kualitas manusia di wilayah tersebut semakin baik. Justifikasi IPM dalam penelitian ini adalah rasionalitas masyarakat terhadap partisipasi politik. Budaya oligarki politik yang tergambar dalam politik di Indonesia jika dikaitkan dengan IPM ini tentunya akan menurunkan kepercayaan publik dalam memberikan dukungan terhadap calon pejabat publik. Oligarki adalah sebagai suatu sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terjadinya pengumpulan kekayaan dan kewenangan di tangan segelintir elite beserta seperangkat mekanisme untuk mempertahankannya. Selain itu, faktor sosio demografi mempengaruhi kepercayaan publik, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi yang artinya anak usia muda dalam struktur kependudukan sangat mendominasi di Indonesia. Anak muda khususnya mahasiswa memiliki rasionalitas dan tuntutan pada pemerintah, sehingga dalam beberapa temuan mereka tidak mau berpartisipasi dan memberikan dukungan pada calon wakil rakyatnya.
3. Pengaruh Nilai Budaya Terhadap Partisipasi

Perempuan dalam Politik

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa nilai budaya matriarki dan patriarki mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam politik. Berdasarkan temuan di lapangan, rendahnya partisipasi perempuan di ranah politik dapat dijelaskan Pola pikir masyarakat yang cenderung mengidolakan laki-laki sebagai gagah dan beruang (memiliki uang) sehingga lebih layak untuk dipilih. Berdasarkan hasil kajian literatur yang menjadi hambatan menurunnya partisipasi politik perempuan adalah peran multiganda perempuan yakni sebagai ibu rumah tangga, pekerja dan masyarakat profesional. Perempuan memiliki keterbatasan waktu untuk masuk di dunia politik karena peran multiganda tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis statistik, ekonomi dan melalui proses pengolahan data yang penulis lakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perempuan yang diproksi dengan rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Nilai Budaya berpengaruh signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan budaya diyakini sebagai suatu kebenaran yang mempengaruhi perilaku manusia yang pada akhirnya membuat sekat-sekat gender dalam kehidupan di ranah publik dan domestik.

V. SARAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, perlu adanya usaha dari pemerintah untuk kembali meningkatkan pendidikan perempuan agar dapat memengaruhi kinerjanya dalam politik, serta partai politik harus memfasilitas pendidikan politik untuk perempuan yang ingin terlibat dalam kontestasi politik. Serta perlu adanya peranan keluarga dalam mendorong perempuan dalam politik. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak referensi dan mengikuti perkembangan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik. (2019). *Profil Perempuan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- [2] Bagit, V. F. (2017). Orientasi Nilai Budaya di Kalangan Perempuan. *Holistik*, 1-25.
- [3] BPS. (2019). Retrieved from Badan Pusat Statistik Web Site: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15%2014:14:39.940779/1566/-ipg-rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2017.html>
- [4] Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- [5] Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics 5th Edition*. New York: McGraw-Hill.
- [6] Julia, A. (2018). *Ekonomi Kependudukan dan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- [7] Koentjaraningrat. (1987). *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- [8] Muslimat, A. (2016). Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik. *Jurnal Gender dan Anak*, 3 (2), 17-29.
- [9] Purwanti, A. (2015, April). Partisipasi Perempuan pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur. *Masalah-Masalah Hukum*, 44 (2).
- [10] Puskapol FISIP UI. (2019, Desember 16). Retrieved from Data DPRD Provinsi Terpilih 2019: <https://www.puskapol.ui.ac.id/data-dprd-provinsi-terpilih-2019>
- [11] Sugiyono, P. D. (2018). *Meode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [12] Tadros, M. (2014). *Womens in Politic Gender, Power, and Decelopment*. New York: Zed Book.
- [13] Todaro, P. M., & Smith, C. S. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [14] UNDP. (1995). *Human Development Report 1995: Gender and Human Development*. New York: UNDP.
- [15] Zellatifany, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskriptif Dalam Komunikasi. *Jurnal Diakom*, Vol.1 No.2, 83-90.